

Peran Kolaboratif Penta Helix Dalam Pemberdayaan Desa Wisata Ngilingof Pulau Kei Kecil

Rizky Jumatul Ulya Siregar¹, Simson Metungun², Kusmawati Bugis³, Resky Sirupang Kanuna⁴

¹²³⁴Politeknik Perikanan Negeri Tual

Riskysiregar0426@gmail.com¹, metungunsony@gmail.com², kusmawatibugis428@gmail.com³,
resky.kanuna@polikant.ac.id⁴.

Info Artikel

Diterima :
Tgl 04 April 2026
Revisi :
Tgl 20 April 2026
Terbit :
Tgl 07 Juni 2026

Key words:

Community
Empowerment,
Cross-Sector
Collaboration,
Sustainable
Tourism, Penta
Helix Model

Kata Kunci:

Pemberdayaan
Masyarakat,
Kolaborasi Lintas
Sektor, Pariwisata
Berkelanjutan,
Penta Helix

Corresponding

Author :

Rizky Jumatul Ulya
Siregar¹, Simson
Metungun², Kusmaw
ati Bugis³, Resky
Sirupang Kanuna⁴.
Email :

Riskysiregar0426@gmail.com¹,
metungunsony@gmail.com²,
kusmawatibugis428@gmail.com³,
resky.kanuna@polikant.ac.id⁴

Abstract

This study aims to examine the collaborative role of the Penta Helix model in the empowerment process of Ngilingof Tourism Village on Kei Kecil Island. The research adopts a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, field observations, and documentation review. The informants include representatives from the village government, academics, business actors (MSMEs), community groups (BUMD-Pokdarwis), and local media. The data were analyzed using a thematic analysis approach to identify patterns of roles and the dynamics of collaboration among stakeholders. The findings indicate that cross-sector collaboration has been established through village policy support and funding, training and mentoring activities facilitated by academics, the development of culture-based tourism products by business actors, active community participation in decision-making processes, and media contributions to destination promotion. This collaboration has had a positive impact on enhancing community capacity and stimulating local economic growth. However, the synergy among stakeholders still requires stronger institutional frameworks and more structured coordination, particularly in terms of integrated promotion and the sustainability of tourism programs. Therefore, the Penta Helix model holds significant potential as a strategic framework for supporting participatory and sustainable tourism village development in archipelagic regions.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kolaboratif model Penta Helix dalam proses pemberdayaan Desa Wisata Ngilingof, Pulau Kei Kecil. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan penelitian melibatkan unsur pemerintah desa, akademisi, pelaku usaha (UMKM), komunitas/BUMD-Pokdarwis, serta media lokal. Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola peran dan dinamika kolaborasi antaraktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor telah terbangun melalui dukungan kebijakan dan pendanaan desa, kegiatan pelatihan dan pendampingan oleh akademisi, pengembangan produk wisata berbasis budaya oleh pelaku usaha, partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta kontribusi media dalam promosi destinasi. Kolaborasi tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Meskipun demikian, sinergi antaraktor masih memerlukan penguatan kelembagaan dan koordinasi yang lebih terstruktur, khususnya dalam aspek promosi terpadu dan keberlanjutan program wisata. Dengan demikian, model Penta Helix berpotensi menjadi kerangka strategis dalam mendukung pengembangan desa wisata yang partisipatif dan berkelanjutan di wilayah kepulauan.

PENDAHULUAN

Pariwisata adalah salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi lokal, khususnya di daerah pedesaan. Konsep desa wisata hadir sebagai bentuk alternatif pengembangan wilayah berbasis potensi lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dengan tetap mengutamakan partisipasi warga lokal dalam pelestarian budaya, alam, dan kehidupan sosial. Pembangunan pariwisata berkelanjutan saat ini menekankan pendekatan yang berbasis masyarakat atau *community-based tourism* (CBT), di mana masyarakat lokal tidak hanya menjadi objek, tetapi subjek dari pembangunan wisata. Dalam konteks ini, desa wisata menjadi bentuk strategis pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal, baik dari sisi alam, budaya, maupun sosial masyarakatnya.

Pemberdayaan (*empowerment*) dalam kaitannya dengan pariwisata merupakan proses peningkatan kapasitas individu dan kolektif masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait pariwisata. Pemberdayaan terjadi ketika individu merasa memiliki kontrol, keterampilan, dan pemahaman terhadap sistem sosial dan ekonomi yang mempengaruhi hidup mereka. Damayanti,dkk (2017) menyatakan bahwa desa wisata yang berhasil memberdayakan masyarakat akan menunjukkan partisipasi aktif dalam perencanaan, pengelolaan, hingga evaluasi kegiatan pariwisata.

Pemberdayaan desa wisata dapat diartikan sebagai suatu proses untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan potensi desa mereka untuk pariwisata secara mandiri, partisipatif, dan berkelanjutan. Menurut Nuryanti (2017), pemberdayaan desa wisata mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat setempat. Strategi pemberdayaan mencakup pelatihan, penyediaan akses informasi, serta penguatan kelembagaan lokal. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya menerima manfaat ekonomi, tetapi juga dapat menjaga identitas budaya dan kearifan lokal. Damayanti dkk (2017), menyatakan bahwa pemberdayaan adalah langkah awal untuk menciptakan *sense of ownership* terhadap aset wisata, sekaligus membangun kapasitas kelembagaan lokal yang mampu mendukung keberlanjutan program wisata di desa. Tanpa pemberdayaan, pengembangan desa wisata berisiko hanya berpusat pada investor eksternal, dan tidak memberikan dampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat setempat. Desa wisata merupakan suatu bentuk dari *community-based tourism* (CBT), di mana masyarakat lokal memegang peran utama dalam penyediaan atraksi wisata, akomodasi, serta jasa penunjang lainnya. Suansri (2013) menekankan pentingnya prinsip *partisipatif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal* dalam pengelolaan desa wisata.

Namun, dalam implementasinya, pengembangan desa wisata menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, hingga kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan (stakeholders). Pengembangan desa wisata memerlukan kerja sama lintas sektor. Salah satu pendekatan yang mulai banyak diterapkan dalam pengelolaan pembangunan daerah, termasuk sektor pariwisata, adalah model kolaboratif Penta Helix. Konsep Penta Helix yaitu model kolaboratif yang melibatkan lima unsur utama: pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, komunitas, dan media. Konsep Penta Helix diharapkan menciptakan sinergi lintas sektor dalam mendorong inovasi, penguatan kapasitas, serta keberlanjutan desa wisata. Kolaborasi antarpihak ini dianggap penting untuk menciptakan pemberdayaan masyarakat yang partisipatif dan berbasis kearifan lokal. Menurut Yunas (2021), kolaborasi Penta Helix menjadi kunci dalam menciptakan inovasi dan keberlanjutan pembangunan karena masing-masing aktor memiliki fungsi saling melengkapi: pemerintah menyediakan kebijakan,

akademisi memberikan kajian dan pelatihan, dunia usaha mendukung dari sisi investasi dan manajemen, komunitas menjadi pelaksana lapangan, dan media bertindak sebagai kanal promosi serta kontrol sosial.

Penta Helix merupakan pendekatan pembangunan yang melibatkan lima unsur utama diantaranya pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media, dimana setiap aktor berkontribusi pada inovasi sosial dan pembangunan berkelanjutan. Lima elemen Penta Helix yaitu: Pemerintah: kebijakan dan regulasi, Akademisi: riset, pelatihan, pendampingan, Bisnis: pendanaan, produk, dan jaringan pasar, Komunitas: pelaku utama dan pemilik aset lokal serta Media: promosi, penyebaran informasi, dan pengawasan sosial. Kolaborasi kelima unsur ini menciptakan ekosistem inovatif dalam pembangunan daerah termasuk sektor pariwisata. Menurut Carayannis & Campbell (2012), model ini sangat efektif dalam menghadapi tantangan kompleks di era ekonomi berbasis pengetahuan. Yunas (2021) menunjukkan bahwa model Penta Helix sangat efektif untuk daerah dengan potensi wisata besar tetapi kapasitas kelembagaan yang masih terbatas, seperti di wilayah kepulauan.

Penelitian Pradana et al. (2021) menunjukkan bahwa kolaborasi Penta Helix mendorong kesuksesan desa wisata melalui; peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan oleh akademisi; akses ke pasar dan jaringan oleh sektor bisnis, ketersediaan regulasi pendukung oleh pemerintah, peran aktif komunitas sebagai pelaku utama dan promosi masif oleh media local. Studi ini menegaskan bahwa desa wisata yang berbasis Penta Helix lebih tahan terhadap krisis dan lebih inovatif dalam pengembangan atraksi wisata.

Peran kolaboratif Penta Helix terbukti dapat meningkatkan daya saing desa wisata melalui sinergi sumber daya dan pengetahuan. Pradana, dkk(2021), Kolaborasi Penta Helix efektif dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, khususnya dalam hal promosi, edukasi, dan penguatan jejaring usaha mikro lokal. Kolaborasi multi pihak sangat dibutuhkan dalam pengembangan desa wisata. Nurhayati, dkk (2019) menekankan bahwa peran aktif masyarakat dan dukungan akademisi serta media sangat menentukan keberhasilan inovasi sosial di desa wisata. Studi mengenai kolaborasi Penta Helix dalam pengembangan desa wisata masih terus berkembang. Penta Helix memiliki peran strategis dalam pemberdayaan desa wisata melalui sinergi antara pemangku kepentingan. Namun, efektivitas kolaborasi ini sangat bergantung pada komitmen, komunikasi, dan koordinasi antar unsur yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana dinamika dan bentuk peran masing-masing aktor dalam kerangka Penta Helix, serta bagaimana kolaborasi tersebut dapat mendorong pemberdayaan yang berkelanjutan di desa wisata. Kolaborasi multipihak ini dipercaya mampu membangun daya saing destinasi melalui inovasi, edukasi, promosi terpadu, serta partisipasi masyarakat lokal. Namun demikian, berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa praktik Pentahelix di daerah masih sering timpang, dengan dominasi peran pemerintah dan minimnya kontribusi dari akademisi serta pelaku usaha (Riantini et al., 2022).

Desa Ngilngof terletak di Kecamatan Manyeuw, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku Pulau Kei Kecil. Kepulauan Kei Kecil, yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, merupakan wilayah kepulauan yang dikenal dengan keindahan alamnya seperti Pantai Ngurbloat, budaya lokal Larvul Ngabal, serta tradisi masyarakat adat yang masih terjaga. Potensi ini menjadikan Kei Kecil sangat layak dikembangkan sebagai kawasan desa wisata. Desa Ngilngof adalah salah satu dari 50 Besar Desa Wisata Terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hal ini menunjukkan potensi dan komitmen desa dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan. Namun, hingga saat ini, pengembangan desa wisata di wilayah ini masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain: aksesibilitas yang terbatas, kurangnya kapasitas pengelolaan lokal,

minimnya promosi, serta lemahnya koordinasi lintas pemangku kepentingan. Oleh karena itu, keutamaan penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana bentuk dan dinamika kolaborasi Penta Helix dapat diimplementasikan dalam konteks pemberdayaan desa wisata di wilayah kepulauan terpencil seperti Kei Kecil. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini berjudul Peran olaboratif penta helix dalam pemberdayaan desa wisata Ngilngof Pulau Kei Kecil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam peran kolaboratif Penta Helix dalam pemberdayaan desa wisata di Kepulauan Kei Kecil. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2017), Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dan peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi proses, dinamika, dan makna di balik fenomena kolaborasi lintas aktor dalam konteks lokal. Penelitian ini dilaksanakan di Kepualaun Kei dengan waktu penelitian bulan Oktober - Desember 2025.

Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam dengan informan penelitian mencakup perwakilan dari kelima unsur Penta Helix. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumentasi maupun sumber-sumber ilmiah yang relevan dengan penelitian ini meliputi dokumen kebijakan, profil UMKM, laporan desa, media sosial UMKM, dan literatur lainnya. Penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling (Sugiono, 2017)) yaitu dengan menyeleksi informan sesuai kriteria spesifik yang relevan dengan tujuan penelitian, untuk memastikan bahwa setiap partisipan memberikan informasi yang mendalam dan terkait langsung dengan fokus studi (Andriani et al., 2025). Informan dalam penelitian ini yakni: Pemerintah daerah (Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa), Akademisi lokal atau peneliti yang terlibat, Pelaku usaha pariwisata (pengelola homestay, travel, UMKM), Tokoh masyarakat dan komunitas lokal, Media lokal (radio, media sosial, atau jurnalis lokal).

Data dianalisis secara kualitatif dengan mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman menurut (Sugiyono, 2013), yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan keabsahan data dijaga melalui triangulasi teknik dan sumber, Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang berasal dari beragam informan, mencakup pihak penyelenggara layanan maupun masyarakat sebagai pengguna. Adapun triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Wisata Ngilngof yang terletak di Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara, merupakan salah satu destinasi wisata pesisir yang memiliki potensi sumber daya alam dan budaya yang sangat menarik. Keunggulan utama desa ini yakni keindahan pantai berpasir putih, kejernihan perairan laut, serta keberlanjutan praktik kehidupan masyarakat yang berorientasi pada budaya maritim. Selain itu, kearifan lokal masyarakat tercermin dalam berbagai tradisi, kuliner, dan aktivitas sosial-ekonomi yang mendukung daya tarik wisata. Pengembangan Desa Wisata Ngilngof dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat lokal serta kolaborasi multipihak guna mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. Untuk mengembangkan potensi wisata yang berada di Desa Wisata Ngilngof diperlukan adanya kolaborasi dari kelima actor. Model Pentahelix yakni

Pemerintah, Akademisi, Business (UMKM), Komunitas (BUMD) dan Media. Berikut dijabarkan peran setiap stakeholder dalam pengembangan Desa Wisata Ngilngof yang terletak di Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara.

1. Peran Pemerintah Desa dalam Penguatan Pemberdayaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang mewakili pemerintah Desa Ngilngof dalam model pentahelix untuk pengembangan Desa Wisata Ngilngof, pemerintah telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam penguatan pemberdayaan. Hasil wawancara dengan Pejabat Desa Ngilngof, Ia menyatakan:

"Strategi yang pemerintah desa lakukan yaitu promosi menggunakan platform digital sebagai sarana utama untuk memperkenalkan Desa Ngilngof kepada wisatawan domestik dan mancanegara, serta memberdayakan rumah masyarakat untuk dijadikan homestay untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Selain itu pemerintah sudah bekerja sama dengan PT astra dan Akademisi dari berbagai kampus, pemerintah juga berperan memberikan bantuan dari anggaran dana desa, bukan hanya dalam bentuk material tetapi juga arahan, menjaga kebersihan, dan tata kelola melalui BUMD yang dibagi dalam beberapa divisi untuk mengkoordinir sektor pariwisata. Di Desa Ngilngof, kami melarang penduduk dari desa lain mengambil hasil laut tanpa persetujuan, menjaga ekosistem terumbu karang, dan melarang membawa pasir sebagai souvenir."

Pernyataan tersebut menunjukkan peran aktif pemerintah sebagai fasilitator dalam pengembangan infrastruktur sosial di bidang pariwisata. Pemerintah desa juga memberikan dukungan terhadap strategi promosi pariwisata yang berfokus pada promosi secara digital dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, bantuan diberikan melalui dana desa serta peningkatan pengelolaan melalui BUMD atau Pokdarwis. Dalam hal regulasi lingkungan, pemerintah desa juga mengeluarkan kebijakan untuk melindungi sumber daya alam.

Disisi lain, pemerintah mengakui adanya tantangan:

"Kendala yang dihadapi adalah pemerintah sudah memfasilitasi, namun pendapatan UMKM yang menurun drastis karena faktor cuaca yang tidak menentu, serta kurangnya penyelenggaraan event yang berdampak pada menurunnya pendapatan."

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah menjalankan fungsinya sebagai regulator dan koordinator dalam model Penta Helix. Namun, faktor eksternal juga ikut berpengaruh dalam stabilitas ekonomi di desa wisata. Pemerintah desa sudah berperan dalam penyediaan regulasi, dukungan dana desa, penguatan tata kelola melalui BUMD/Pokdarwis, serta perlindungan lingkungan pesisir melalui kebijakan-kebijakan seperti larangan mengambil pasir dan perlindungan terumbu karang menunjukkan adanya orientasi pada prinsip keberlanjutan. Hal tersebut selaras dengan konsep sustainable tourism yang menekankan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan (UNWTO, 2018). Dalam perspektif collaborative governance, pemerintah berfungsi sebagai *meta-governor* yang mengoordinasikan berbagai aktor (Ansell & Gash, 2008). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemerintah desa telah membangun koordinasi dengan akademisi dan sektor swasta (PT Astra), namun integrasi dengan media belum terstruktur secara formal. Menurut Nurhayati et al. (2019), keberhasilan pengembangan desa wisata berbasis Penta Helix sangat ditentukan oleh konsistensi koordinasi dan forum komunikasi lintas aktor.

2. Kontribusi Akademisi dalam Peningkatan Kapasitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang mewakili akademisi dalam model pentahelix untuk pengembangan Desa Wisata Ngilngof, akademisi dari Politeknik Perikanan Negeri Tual telah melaksanakan berbagai kegiatan pengabdian dan pendampingan. Salah satu narasumber dosen menyampaikan:

"Politeknik Perikanan Negeri Tual sudah banyak melakukan kegiatan di Desa Ngilngof dalam bentuk pengabdian, pelatihan, pendampingan, dan kegiatan praktik mahasiswa. Salah satu kegiatan adalah Fisheries and Marine Youth Exploration, di mana pengelola destinasi menjadi pemateri sehingga ada hubungan timbal balik. Ada perjanjian kerja sama antara Politeknik Perikanan Negeri Tual dan Desa Ngilngof yang ditandatangani langsung oleh pemerintah desa dan direktur. Kami memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM dan pengelola destinasi terkait tata kelola wisata serta sosialisasi kepada masyarakat. Meskipun demikian, tantangan tetap ada. Tantangannya adalah bagaimana menarik minat dan partisipasi masyarakat dalam penelitian, pelatihan, dan pendampingan."

Hal ini menunjukkan bahwa peran akademisi cukup signifikan dalam meningkatkan kapasitas SDM. Kerja sama formal sudah dilaksanakan dan diwujudkan dengan berbagai kegiatan pengabdian dan pendampingan. Kontribusi akademisi dalam pemberdayaan terlihat dari pelatihan UMKM dan tata kelola destinasi. Keterlibatan akademisi melalui pelatihan, pendampingan UMKM, dan program magang mahasiswa menunjukkan adanya transfer pengetahuan (*knowledge transfer*) yang menjadi inti model Helix (Garayannis & Campbell, 2012). Dalam teori pemberdayaan, peningkatan kapasitas masyarakat merupakan elemen fundamental agar masyarakat memiliki kontrol terhadap pembangunan (Damayanti et al., 2017). Program seperti *Fisheries and Marine Youth Exploration* mencerminkan model partisipatif di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek penelitian, tetapi juga mitra pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendekatan Community-Based Tourism (CBT) yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan destinasi (Suansri, 2013). Namun, tantangan dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat menunjukkan bahwa pemberdayaan adalah proses jangka panjang yang memerlukan pendekatan sosial-kultural yang adaptif (Nuryanti, 2017).

3. Pelaku Usaha (UMKM)

Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku UMKM kuliner yang menjadi salah satu tujuan kunjungan ketika berwisata. Wawancara dengan informan sebagai pelaku UMKM menunjukkan keterlibatan aktif sektor bisnis lokal. Ia menyatakan:

"UMKM di Desa Ngilngof sangat aktif dalam kegiatan desa wisata dan selalu mengikuti aturan dari badan pengelola. Kami juga dilibatkan dalam rapat bersama pengelola. Pemerintah setempat juga mendukung dengan bantuan dari dana desa untuk pelaku usaha, dan kami juga bekerja sama membangun tiang lampu di area wisata. Kami membuat paket wisata yang menyajikan budaya, kuliner lokal, dan tarian adat untuk mempertahankan dan melestarikan budaya."

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha telah menjalankan peran sebagai inovator ekonomi lokal, dukungan pemerintah desa dirasakan secara langsung oleh para pelaku usaha. Sebanyak 80% masyarakat Desa Ngilngof bergantung pada sektor jasa pariwisata, menunjukkan dampak ekonomi yang signifikan. Pengembangan paket wisata berbasis budaya dan kuliner lokal memperlihatkan integrasi antara ekonomi kreatif dan pelestarian budaya. Hal ini mendukung temuan Pradana et al. (2021) bahwa kolaborasi Penta Helix mampu meningkatkan daya saing desa wisata melalui inovasi produk lokal dan penguatan jejaring usaha mikro. Namun,

kendala rendahnya literasi wisatawan menunjukkan perlunya strategi edukasi pengunjung dan manajemen destinasi yang lebih profesional. Dalam konteks ekonomi pariwisata, kualitas pengalaman wisatawan sangat menentukan keberlanjutan destinasi (Cooper et al., 2018).

4. Partisipasi Komunitas dan Peran BUMD/Pokdarwis

Komunitas yang menjadi informan peneliti adalah Pengelola BUMD dan Kelompok sadar Wisata. Ketua BUMD, menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat sangat tinggi:

"Keterlibatan masyarakat sangat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa wisata. Sehingga untuk ekonomi saat ini sangat berdampak karena 80% masyarakat menjual jasa di sektor pariwisata. Masyarakat sangat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, kebijakan selalu bersinambungan dengan masyarakat. Selain itu Pokdarwis menjaga kelestarian melalui peraturan di destinasi wisata dan pelibatan aktif masyarakat dalam kegiatan adat."

Hasil penelitian ini menunjukkan kuatnya prinsip community-based tourism, di mana masyarakat bukan hanya penerima manfaat tetapi juga pengambil keputusan. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan destinasi menunjukkan implementasi prinsip partisipatif dalam CBT. Ansell dan Gash (2008) menekankan bahwa partisipasi yang inklusif meningkatkan legitimasi kebijakan dan keberlanjutan kolaborasi. Penguatan kelembagaan melalui BUMD/Pokdarwis juga menunjukkan adanya institusionalisasi partisipasi masyarakat. Menurut Yunas (2021), Dalam konteks wilayah kepulauan di Indonesia Timur, model Penta Helix sangat efektif apabila komunitas memiliki *sense of ownership* yang kuat terhadap aset wisata. Hasil penelitian ini menekankan bahwa masyarakat Ngilngof memiliki kesadaran kolektif dalam menjaga budaya dan lingkungan.

5. Peran Media dalam Promosi

Media yang menjadi informan peneliti adalah Media Suara Damai.com. Narasumber keterwakilan media Suara Damai mengakui bahwa peliputan di Desa wisata Ngilngof dilakukan secara berkala:

"Setahun ada peliputan, kadang sebulan bisa lima sampai enam berita, tetapi tidak setiap bulan. Pariwisata membutuhkan promosi, dan di situlah media mempunyai peran yang sangat strategis dan efektif. Namun kami belum mempunyai strategi baku untuk mempromosikan destinasi wisata Ngilngof. Harapan kami ada inisiatif dari pemerintah agar media bisa berkolaborasi khusus di pariwisata."

Hal ini menunjukkan bahwa unsur media dalam Penta Helix masih bersifat potensial dan belum terintegrasi secara formal. Peran media dalam penelitian ini masih bersifat sporadis dan belum terlembaga dalam kerja sama formal. Dalam model Penta Helix, media berfungsi sebagai akselerator informasi dan pembentuk citra destinasi (Carayannis & Campbell, 2012). Peran media dalam pengembangan Desa Wisata Ngilngof meskipun belum optimal tetapi sudah sejalan dengan tujuan model Pentahelix yaitu sebagai expander. Media berperan dalam mendukung promosi dan publikasi (Maulana, 2022). Dalam era digital, promosi berbasis media sosial menjadi faktor kunci dalam meningkatkan visibilitas destinasi (Hudson & Thal, 2013). Ketidakteraturan strategi promosi di Desa Ngilngof menunjukkan perlunya perencanaan branding terpadu. Media lokal sebenarnya memiliki potensi besar sebagai mitra strategis dalam membangun narasi positif dan meningkatkan daya tarik wisata.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa kolaborasi Penta Helix di Desa Ngilngof telah berjalan dengan keterlibatan aktif seluruh actor walaupun belum maksimal. Pemerintah berfungsi sebagai

regulator dan fasilitator, akademisi sebagai penguat kapasitas, pelaku usaha sebagai penggerak ekonomi, komunitas sebagai aktor utama, dan media sebagai saluran promosi. Namun kolaborasi ini masih bersifat dinamis dan belum sepenuhnya terlembaga secara sistematis, terutama dalam aspek regulasi dan promosi terpadu dan keberlanjutan event wisata. Pelaksanaan model Pentahelix seringkali terhambat oleh tidak adanya forum kolaborasi, lemahnya koordinasi, dan ketidakseimbangan relasi kuasa antaraktor (Yesayabela et al., 2025; Kuswandi et al., 2025). Pemerintah cenderung dominan, sementara empat unsur lainnya (akademisi, pelaku usaha, masyarakat, media) belum diberi ruang dan dukungan yang cukup. Kondisi ini menunjukkan ketimpangan struktural dalam tata kelola pariwisata yang seharusnya bersifat partisipatif (Anugrah, dkk, 2025).

Meskipun demikian, tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi (80% bergantung pada sektor pariwisata) menjadi indikator kuat bahwa pemberdayaan berbasis Penta Helix memiliki dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Ngilngof. Penelitian ini memperkuat teori bahwa model Penta Helix efektif dalam pengembangan desa wisata berbasis masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan dengan keterbatasan kapasitas kelembagaan (Yunas, 2021). Sinergi antara kelima pilar dalam Penta Helix sangat penting untuk keberlanjutan dan keberhasilan pengembangan pariwisata desa (Hasan, R. D., Sahara, L. S., Abidin, J., & Erfinda, Y, 2025).

KESIMPULAN

Model kolaborasi Penta Helix memiliki peran signifikan mendorong pemberdayaan Desa Wisata Ngilngof, Pulau Kei Kecil. Pemerintah desa menjalankan fungsinya yakni sebagai regulator dan fasilitator melalui dukungan kebijakan, alokasi dana desa, serta penguatan kelembagaan BUMD/Pokdarwis. Akademisi juga berperan serta dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, penelitian, dan program magang. Pelaku usaha lokal berperan sebagai penggerak ekonomi melalui pengembangan produk wisata berbasis budaya dan potensi lokal. Partisipasi aktif komunitas dalam perencanaan dan pengambilan keputusan mencerminkan penerapan prinsip pariwisata berbasis masyarakat. Sementara itu, media berkontribusi dalam promosi dan pembentukan citra destinasi, meskipun belum terintegrasi secara kelembagaan dalam skema kolaborasi yang sistematis. Secara keseluruhan, kolaborasi lintas sektor telah memberikan dampak ekonomi dan sosial yang nyata. Namun, diperlukan penguatan koordinasi, strategi promosi terpadu, dan institusionalisasi kemitraan agar keberlanjutan dan daya saing desa wisata dapat terjamin secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D. A., & Mursyidah, L. (2025). Service Quality Evaluation: The Empathy Gap in Ngampelsari Village Administration. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 26(2). <https://doi.org/10.21070/ijppr.v26i2.1446>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Anugrah Bella Yulia, Erwin Erwin, Syahrizal Syahrizal.(2025). Membangun Pariwisata Kolaboratif: Peran Aktor Pentahelix Di Nagari Ganggo Mudiak. *Kepariwisata: Jurnal Ilmiah*. Vol 19 No 3. <https://ejournal.stipram.ac.id/index.php/kepariwisataan/article/view/867>
- Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2012). *Mode 3 Knowledge Production in Quadruple Helix Innovation Systems: 21st-Century Democracy, Innovation, and Entrepreneurship for Development*.

- Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., & Wanhill, S. (2018). *Tourism: Principles and practice* (6th ed.). Pearson.
- Damayanti, M., Scott, N., & Ruhanen, L. (2017). Community empowerment through ecotourism: Sustainable tourism and village development in Indonesia. *The Journal of Sustainable Tourism*, 25(9), 1231–1250. <https://doi.org/10.1080/09669582.2016.1257017>
- Hasan, R. D., Sahara, L. S., Abidin, J., & Erfinda, Y. (2025). Peran Kolaborasi Pentahelix dalam Pengembangan Destinasi Wisata Desa Mekarbuana Kecamatan Tegalwaru, Kab. Karawang – Jawa Barat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 919–930. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18278>
- Kuswandi, I., Rachman, M. H., & Putra, Y. A. (2025). Kolaborasi Pentahelix dan pemberdayaan UMKM dalam desa wisata Bantaragung, Majalengka. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(1), 34–47.
- Maulana, Syafiq M.Hanafi., Budi Azwa. (2022). Model Pentahelix Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Perlang Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 2 (2022) 97-107. Published by Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. e-ISSN 2963-9182
- Nurhayati, S., Wijayanto, B., & Purnomo, M. (2019). "Collaborative Governance in Tourism Village Development: A Penta Helix Perspective". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 23(1), 45–60. <https://doi.org/10.22146/jsp.45019>
- Nuryanti, W. (2017). *Desa Wisata: Konsep dan Strategi Pengembangan* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pradana, A., Gunawan, A., & Widodo, T. (2021). The Role of Penta Helix in Strengthening Village Tourism: A Case Study in Central Java. *Journal of Tourism and Local Wisdom*, 3(2), 134–147. <https://doi.org/10.31294/jtlw.v3i2.10231>
- Pribadi, T. I., & Setiawan, M. A. (2024). Peran Pentahelix dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Bonjeruk, Kabupaten Lombok Tengah. *GENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 1(7), 305–316. <https://doi.org/10.62335/cesa0k76>
- Riantini, R., Kusumawardhani, A., & Putri, R. D. (2022). Kolaborasi Pentahelix dalam Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Pengembangan Wilayah*, 12(1), 45–59
- Springer.Yunas, R. (2021). Model Kolaborasi Penta Helix dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Komunitas di Indonesia Timur. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(2), 201–215. <https://doi.org/10.22146/jsp.62135>
- Suansri, P. (2013). *Community Based Tourism Handbook*. Bangkok: Responsible Ecological Social Tour Project.
- UNWTO. (2018). *Tourism for sustainable development goals*. World Tourism Organization.
- Yesayabela, M., Lestari, A., & Handoko, B. (2025). Peran Akademisi dalam Pengembangan Desa Wisata Pandean, Trenggalek. *Jurnal Pariwisata Berbasis Komunitas*, 5(1), 63–75
- Yunas, R. (2021). Model Kolaborasi Penta Helix dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(2), 201–215. <https://doi.org/10.22146/jsp.62135>

